Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)
Volume 6, Nomor 2, September 2025
ISSN 2721 - 4311
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP



Peran pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam Penurunan Prevelensi Stunting

Noviyantika azzahra pgb[1], Agus Suriadi[2]*
1,2) Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
*E-mail: agus4@usu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran yang dijalankan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan stunting di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, serta berbagai tantangan yang muncul dalam implementasi program-program penanggulangan. Fokus kajian mencakup tingginya angka stunting, minimnya sarana dan prasarana posyandu, serta rendahnya tingkat pengetahuan orang tua mengenai pola pengasuhan anak. Penelitian ini menggunakan teori peran dari Jim Ife, yang meliputi peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis. Metodologi yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara. Temuan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah mencakup berbagai program seperti Posyandu, Kelas Ibu Hamil, pemberian Tablet Tambah Darah (PTTD), dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta penyuluhan yang dilakukan oleh Puskesmas dan kader kesehatan. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan pengetahuan orang tua tentang gizi dan pola asuh anak, ketiadaan lokasi tetap untuk kegiatan posyandu, keterbatasan tenaga dan dana, serta kurangnya partisipasi aktif dari keluarga. Selain itu, kendala logistik seperti sulitnya akses transportasi ke wilayah terpencil turut menghambat efektivitas program. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat dalam penanganan stunting secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Peran, penanganan *stunting*, program.

Abstract

This study aims to analyze the role of the government in addressing the issue of stunting in Barumun District, Padang Lawas Regency, as well as the various challenges encountered in implementing stunting prevention programs. The research focuses on the high prevalence of stunting, the limited infrastructure and facilities of community health posts (Posyandu), and the low level of parental knowledge regarding child-rearing practices. The study adopts Jim Ife's role theory, which includes facilitative, educational, representational, and technical roles. A qualitative approach was employed, with data collected through field observations and interviews. The findings reveal that government efforts involve programs such as Posyandu, Maternal Classes, Iron Supplementation (PTTD), and Supplementary Feeding (PMT), as well as educational outreach conducted by local health centers (Puskesmas) and community health workers. However, the implementation of these programs faces several obstacles, including limited parental understanding of nutrition and childcare, the absence of permanent facilities for Posyandu activities, shortages in human resources and funding, and the lack of active family participation. Additionally, logistical issues such as poor transportation access to remote areas further hinder program effectiveness. This research underscores the importance of collaboration between the government, healthcare workers, and the community in comprehensively and sustainably tackling the stunting problem.

***Keywords**: Role, Handling Stunting, Program.*

Cara citasi : Pgb, Noviyantika Azzahra. Suriadi, Agus (2025). Peran pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam Penurunan Prevelensi Stunting. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol 6 No 2 September 2025*, 237-249.

DOI: https://doi.org/10.30596/jisp.v6i2.22220

Naskah diterima : 16-12-2024 **Revisi akhir :** 14-05-2025 **Disetujui :** 25-08-2025

Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan global yang mendorong negara-negara di dunia untuk berkomitmen dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama dari komitmen tersebut adalah mengeliminasi kemiskinan ekstrem sepenuhnya pada tahun 2030. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat sebesar 2,04%, dengan target ambisius untuk mencapai 0% atau target realistis sebesar 1% pada tahun 2024 (Rosyadi, 2017). Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan individu atau kelompok berada di bawah ambang batas kelayakan hidup. Pengukuran kemiskinan ekstrem dilakukan menggunakan pendekatan *absolute poverty measure* yang diakui secara internasional dan berlaku lintas negara serta waktu. Kondisi kemiskinan ini menjadi salah satu penyebab utama stunting pada balita, karena keluarga miskin cenderung tidak mampu mencukupi kebutuhan gizi anak-anaknya, yang berdampak pada gangguan pertumbuhan.

Stunting sendiri adalah kondisi terhambatnya pertumbuhan pada anak balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis, khususnya selama 1.000 hari pertama kehidupan. Dampaknya tidak hanya terlihat dari pertumbuhan fisik yang terhambat, tetapi juga perkembangan otak yang kurang optimal dan meningkatnya risiko penyakit kronis di masa depan. Pada level makro, stunting juga berdampak negatif terhadap ekonomi negara, yaitu menurunnya Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2–3% per tahun. Selain itu, peran ibu sangat menentukan, karena buruknya status gizi selama kehamilan, kurangnya pengasuhan yang tepat, serta layanan kesehatan yang tidak memadai turut meningkatkan risiko terjadinya stunting. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), yang merupakan faktor risiko utama terjadinya stunting.

Upaya untuk mengatasi stunting membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan koordinatif antar sektor. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam kerangka program *Scaling Up Nutrition* (SUN), yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Strategi yang digunakan mencakup penyebaran informasi, advokasi lintas sektor, serta pelatihan bagi aparat pemerintah dan kader masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan dalam perbaikan status gizi. Intervensi yang mendukung program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) juga diharapkan dapat tertanam dalam kebiasaan

masyarakat, disertai dengan penyuluhan kepada ibu dan calon ibu untuk memastikan pertumbuhan janin yang optimal sejak awal kehamilan (Aryastami, 2017).

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka stunting, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Di Pulau Sumatera, empat provinsi mencatatkan angka stunting yang tinggi, yaitu Aceh (39,0%), Sumatera Utara (42,3%), Sumatera Selatan (40,4%), dan Lampung (36,2%), yang semuanya berada di atas rata-rata nasional sebesar 29,6% (Kemenkes RI, 2018). Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas menjadi salah satu daerah prioritas dalam penanganan stunting, dengan prevalensi sebesar 11,38% pada tahun 2019 (Dinkes Sumut, 2019).

Sebagai wujud komitmen terhadap program nasional, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah menetapkan penanggulangan stunting sebagai agenda prioritas dalam pembangunan daerah. Dalam pidatonya, Bupati Padang Lawas, drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu CHt MM, M.Si, MH (AZP), menyampaikan bahwa stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga menghambat perkembangan otak dan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Untuk itu, pemerintah daerah telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan lokal, antara lain penguatan layanan Posyandu, penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil dan Balita, pemberian makanan tambahan (PMT), serta intervensi gizi bagi ibu hamil dan anak-anak. Selain itu, peran kader kesehatan desa diperkuat, dan program pendampingan keluarga dilakukan secara berkala. Edukasi gizi dan pola pengasuhan juga terus diperluas melalui kerja sama aktif dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Hasil dari berbagai kebijakan tersebut mulai terlihat melalui penurunan angka stunting secara bertahap di wilayah tersebut. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai sektor, serta kerja sama antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan penanggulangan stunting. Oleh karena itu, studi mengenai peran pemerintah daerah dalam menangani stunting di Padang Lawas sangat penting, tidak hanya sebagai bahan evaluasi, tetapi juga sebagai dasar pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna memperoleh data deskriptif berupa narasi lisan maupun tertulis dari subjek yang diamati. Tujuan pendekatan ini adalah menggali secara mendalam dinamika sosial serta fenomena

yang berkaitan dengan upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Padang Lawas. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena dinilai efektif dalam menelusuri kondisi faktual di lapangan dan menangkap makna subjektif dari kebijakan serta tindakan para pemangku kepentingan (Moleong, 2017). Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan secara selektif berdasarkan kriteria relevansi terhadap isu penelitian. Lima informan utama terdiri dari Kepala Bappeda dan aktor-aktor kunci lain yang terlibat langsung dalam proses perencanaan hingga evaluasi program stunting. Pemilihan Kepala Bappeda didasari perannya yang sentral dalam mengoordinasikan kebijakan pembangunan daerah, sementara informan lain dipilih karena keterlibatan aktif mereka di lapangan, seperti tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan petugas Puskesmas. Pertimbangan pemilihan mencakup pengalaman, posisi strategis, serta komitmen mereka terhadap isu yang dikaji. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi langsung di lokasi kegiatan, dan telaah dokumen kebijakan serta laporan program. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, yang keseluruhannya diarahkan untuk menghasilkan pemahaman mendalam secara holistik berdasarkan kerangka teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perry (2017) mendefinisikan peran sebagai pola atau serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial yang mereka tempati dalam suatu kelompok atau masyarakat. Peran ini mencakup hak dan kewajiban yang diterima oleh individu dalam menjalankan tugas sosialnya.

Teori Peran menurut Jim Ife

a. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif merujuk pada upaya untuk mendukung, memperkuat, serta mengakui kontribusi dan usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas mereka. Peran ini mencakup proses pembentukan kesepakatan dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memajukan potensi yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan komunitas. Dalam hal penanggulangan stunting di Kabupaten Padang Lawas, peran fasilitatif pemerintah sangat penting untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan gizi.

Penelitian menunjukkan bahwa stunting masih menjadi masalah gizi kronis yang signifikan di Kabupaten Padang Lawas, dengan penyebab yang bersifat multidimensional. Penyebab langsungnya antara lain kekurangan gizi yang memengaruhi kesehatan dan pertumbuhan anak, sementara penyebab tidak langsung mencakup faktor lingkungan yang kurang mendukung, seperti sanitasi yang buruk, terbatasnya akses air bersih, serta praktik buang air besar sembarangan.

Menanggapi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah mengambil langkah strategis dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting. Dalam kerangka peran fasilitatif, pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung, seperti penguatan program Posyandu, penyediaan makanan tambahan, dan pelatihan bagi kader kesehatan. Gerakan percepatan penurunan stunting yang digagas pemerintah mencerminkan upaya aktif untuk mendukung pengembangan kapasitas masyarakat lokal, sesuai dengan teori Jim Ife yang menekankan pentingnya pemberdayaan dan kolaborasi dalam pembangunan sosial.

Namun, pelaksanaan peran fasilitatif ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana Posyandu. Banyak Posyandu di wilayah terpencil yang tidak memiliki fasilitas tetap dan masih menumpang di rumah warga atau balai desa yang tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan. Selain itu, keterbatasan peralatan pendukung seperti timbangan digital, pengukur tinggi badan, dan bahan edukasi gizi sering menghambat kelancaran kegiatan. Kader yang tersedia pun sering kali belum memiliki pelatihan yang memadai, sehingga kualitas layanan yang diberikan belum optimal.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan mengalokasikan dana desa untuk pembangunan dan rehabilitasi Posyandu, pengadaan alat kesehatan dasar, serta peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Pemerintah juga berusaha memperkuat koordinasi lintas sektor dengan membentuk forum integrasi program gizi dan sanitasi untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

Namun demikian, rendahnya responsivitas masyarakat terhadap program pemerintah menjadi tantangan tambahan dalam implementasi peran fasilitatif ini. Praktiknya, partisipasi aktif masyarakat—khususnya ibu—dalam kegiatan Posyandu atau program penyuluhan masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor,

seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya gizi dalam 1.000 hari pertama kehidupan, beban kerja domestik yang tinggi, atau persepsi bahwa stunting bukanlah masalah serius. Beberapa informan mengungkapkan bahwa ketidakinginan masyarakat untuk terlibat lebih jauh disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai manfaat jangka panjang dari program pemerintah.

Oleh karena itu, di masa depan, pemerintah perlu memperkuat pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda dalam kegiatan edukasi dan advokasi. Sosialisasi yang berkelanjutan dengan pendekatan budaya lokal akan meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, peran fasilitatif pemerintah tidak hanya dilihat sebagai penyedia fasilitas, tetapi juga sebagai pendorong perubahan perilaku dan kesadaran kolektif dalam upaya penanggulangan stunting secara menyeluruh dan berkelanjutan.

b. Peran Edukasi

Evaluasi efektivitas program edukasi dan penyuluhan terkait stunting sangat penting untuk menilai sejauh mana program ini berhasil dalam meningkatkan kesadaran, perilaku, dan kesehatan masyarakat, khususnya ibu-ibu yang berperan penting dalam perawatan anak. Aspek utama yang digunakan untuk evaluasi meliputi peningkatan keterlibatan ibu dalam Posyandu, yang dapat dilihat dari peningkatan kunjungan dan partisipasi ibu dalam kegiatan tersebut. Selain itu, evaluasi kesadaran masyarakat mengenai stunting juga penting, dengan memeriksa pemahaman ibu tentang penyebab dan pencegahan stunting, serta pentingnya gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan. Perubahan perilaku juga menjadi indikator penting, seperti peningkatan konsumsi makanan bergizi dan kebiasaan menjaga kebersihan. Selain itu, penurunan angka stunting dan peningkatan status kesehatan anak juga dapat menjadi bukti keberhasilan program. Evaluasi juga mencakup tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyuluhan, yang dapat diukur melalui survei atau wawancara mengenai kesesuaian materi dan efektivitas fasilitator. Semua indikator ini membantu pemerintah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan program, serta memberikan dasar untuk perbaikan dan penguatan upaya penanggulangan stunting di daerah tersebut.

c. Peran Representasional

Peran representasional mengindikasikan pentingnya interaksi dengan berbagai lembaga dalam masyarakat untuk mendukung kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran tersebut dilakukan untuk

memperoleh sumber daya eksternal serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan para pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, melalui BAPPEDA, memiliki peran krusial dalam implementasi program penanggulangan stunting, bekerja sama dengan berbagai sektor dan lembaga baik di tingkat lokal maupun nasional.

Salah satu aspek kunci dalam peran representasional adalah pengelolaan anggaran yang memadai. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalokasikan dana khusus untuk menangani masalah stunting yang berasal dari berbagai sumber, seperti dana desa, dana dari dinas KB, Dana Alokasi Khusus (DAK), anggaran APBN dan APBD, serta dana dari mitra lainnya. Semua sumber daya ini dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program dan mencapai tujuan penurunan angka stunting.

Efektivitas program penurunan stunting dievaluasi dengan memantau perubahan prevalensi stunting secara teratur dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Pemerintah juga memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan, dengan adanya koordinasi antara berbagai strategi yang dilaksanakan. Evaluasi ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan selama kehamilan dan memberikan perhatian kepada anak-anak yang sudah mengalami stunting.

Di samping itu, kerja sama dengan berbagai sektor juga menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas program ini. Beberapa bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Kerjasama dengan Sektor Pendidikan: Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor pendidikan untuk memasukkan materi tentang gizi dan pencegahan stunting ke dalam kurikulum sekolah, guna meningkatkan pemahaman anak-anak dan remaja tentang pola makan sehat yang nantinya diterapkan dalam keluarga mereka.

2. Kerjasama dengan Sektor Kesehatan: Sektor kesehatan berperan langsung dalam penurunan stunting melalui pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan anak-anak di fasilitas kesehatan, serta melalui program imunisasi dan pemberian makanan tambahan. Pemerintah dapat bermitra dengan Puskesmas, rumah sakit, dan tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan rutin dan memberikan edukasi tentang pentingnya nutrisi yang baik.

3. Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat: LSM dan organisasi masyarakat yang fokus pada kesehatan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tentang pencegahan stunting, serta memonitor pelaksanaan program-program kesehatan di tingkat desa.

Kolaborasi antara sektor-sektor ini memungkinkan pencapaian hasil yang lebih optimal dalam penanggulangan stunting, dengan memastikan bahwa semua pihak terlibat aktif dan berkontribusi pada upaya kolektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Melalui sinergi antar sektor, diharapkan target penurunan prevalensi stunting dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

d. Peran Teknis

Peran teknis pemerintah dalam upaya penanggulangan stunting menghadapi tantangan besar terkait dengan akurasi pendataan, terutama untuk ibu yang memiliki anak stunting. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya ibu-ibu, dalam kegiatan Posyandu. Ketika ibu tidak hadir, pendataan kondisi kesehatan dan gizi anak menjadi sulit dilakukan, padahal Posyandu merupakan titik utama untuk memantau tumbuh kembang anak dan mencatat status gizinya. Ketidakhadiran ini menyebabkan data yang tidak terbarui, yang pada gilirannya dapat mengarah pada kebijakan atau intervensi yang tidak tepat sasaran.

Rendahnya kehadiran masyarakat di Posyandu disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya kunjungan rutin, kesibukan ibu dengan pekerjaan rumah tangga, dan terbatasnya akses ke Posyandu di beberapa daerah. Selain itu, ibu yang tidak tahu jadwal Posyandu atau merasa tidak nyaman untuk datang juga menjadi penghalang.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi praktis dapat diterapkan. Salah satunya adalah dengan memperkuat komunikasi antara pemerintah, kader kesehatan, dan masyarakat. Penggunaan teknologi, seperti pengingat melalui SMS atau aplikasi, dapat membantu memberi informasi lebih jelas mengenai jadwal Posyandu dan kegiatan kesehatan lainnya, sehingga ibu lebih terinformasi dan termotivasi untuk hadir.

Selain itu, pemberian insentif kepada ibu yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Misalnya, pemberian bantuan pangan atau kebutuhan anak bagi ibu yang hadir rutin di Posyandu atau mengikuti

penyuluhan mengenai stunting. Insentif seperti ini bisa mendorong lebih banyak ibu untuk menjaga kesehatan anak dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya gizi yang baik.

Pendataan berbasis komunitas juga bisa menjadi solusi yang efektif. Melibatkan kader kesehatan atau relawan setempat untuk melakukan pemantauan langsung di rumah-rumah atau desa-desa dapat menghasilkan data yang lebih akurat, meskipun ibu tidak hadir di Posyandu. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah memperoleh informasi lebih tepat waktu tentang kondisi kesehatan anak-anak, yang pada akhirnya akan mempermudah upaya penanggulangan stunting.

Dengan memperkuat komunikasi, memberikan insentif, dan menggunakan pendekatan berbasis komunitas, hambatan dalam proses pendataan dapat diatasi, sehingga program penanggulangan stunting dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien, serta lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peran yang dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tim Percepatan Penurunan Stunting RI yang dibuka oleh Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, di Jakarta pada Kamis (25/4/2024), diumumkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan yang signifikan. Angka prevalensi yang sebelumnya 35,8 persen pada tahun 2022, turun menjadi 17,7 persen pada tahun 2023 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Hal ini menunjukkan penurunan sebesar 18,1 persen dalam setahun, menjadikan Kabupaten Padang Lawas salah satu daerah dengan penurunan stunting terbaik di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini berada di bawah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dengan prevalensi 23,8 persen dan Kota Tanjung Balai yang mencatatkan 21,2 persen. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas, Markia Hasibuan, SE, bersama Technical Assistant Satgas Stunting Kabupaten Padang Lawas, Ahmad Sarifuddin Rambe, menyampaikan rasa syukur dan kegembiraan atas pencapaian ini. Saat ini, Kabupaten Padang Lawas menempati posisi ke-14 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dalam hal penurunan prevalensi stunting.

Faktor – Faktor Penghambat Peran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam Penurunan Prevelensi *Stunting*

Secara umum, penulis menemukan beberapa masalah selama penelitian yang dilakukan, antara lain:

a. **Indikator Peran Fasilitatif**: Peran ini mengukur sejauh mana pemerintah menyediakan fasilitas untuk mendukung masyarakat, namun peran tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Beberapa kendala yang ditemui antara lain pelaksanaan kegiatan posyandu yang masih berpindah-pindah tempat dan belum memiliki lokasi tetap, sehingga program yang seharusnya diberikan kepada ibu dan anak balita tidak dapat dijalankan dengan optimal. Solusi dari indikator ini ialah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebaiknya menjalin kerjasama dengan pihak desa atau kelurahan untuk menetapkan lokasi Posyandu yang tetap. Dengan adanya lokasi yang tetap, ibu dan anak balita akan lebih mudah mengakses informasi mengenai tempat dan jadwal kegiatan Posyandu, yang akan meningkatkan partisipasi dan mempermudah pelaksanaan program. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas fasilitas di Posyandu dengan menyediakan sarana yang memadai, seperti ruang yang nyaman untuk kegiatan, peralatan kesehatan yang lengkap, serta area khusus untuk edukasi bagi ibu dan anak.

b. **Indikator Peran Edukasi**: Peran ini mengukur seberapa intens pemerintah dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait penanganan stunting. Peneliti menemukan bahwa masih terdapat kekurangan informasi yang diterima oleh ibu balita mengenai program atau penanganan stunting. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses media massa yang dimiliki, seperti televisi dan ponsel pintar, yang mengurangi kesempatan untuk memperoleh informasi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu mengutamakan pendekatan berbasis masyarakat dengan melibatkan peran aktif kader, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program penanganan stunting. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memperkuat pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan organisasi kemasyarakatan. Penyuluhan yang dilakukan melalui pertemuan langsung di tingkat desa atau kelurahan akan memastikan informasi tersampaikan dengan baik kepada ibu balita. Selain itu, memberikan pelatihan tambahan kepada kader kesehatan akan membantu mereka menyampaikan informasi tentang stunting dan langkah-langkah pencegahannya secara lebih efektif kepada ibu-ibu.

c. **Indikator Peran Reseptasional**: Peran ini menilai kerjasama antar instansi dalam mencapai tujuan penanganan stunting. Terdapat beberapa kendala, seperti terbatasnya kerjasama dengan pihak pemerintah maupun non-pemerintah dalam program stunting. Padahal, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar manfaat yang dapat dirasakan, seperti bantuan pembangunan atau sosial. Oleh karena itu, diperlukan tahapan monitoring yang mencakup penyusunan indikator, pengumpulan data, dan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan. Indikator yang digunakan meliputi indikator proses, seperti jumlah penyuluhan, kader terlatih, dan kunjungan rumah, serta indikator output, seperti cakupan penyuluhan. Rencana kegiatan lanjutan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan organisasi masyarakat. Rutin mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk merencanakan program bersama, serta berbagi sumber daya dan pengetahuan yang saling mendukung. Membangun kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, seperti LSM dan sektor swasta, juga penting untuk mendukung program penanggulangan stunting, baik melalui bantuan dana, pelatihan, atau kampanye sosial. Untuk memastikan keberhasilan kolaborasi ini, pemerintah perlu menyusun indikator yang jelas untuk proses dan output, seperti jumlah kader yang terlatih, frekuensi penyuluhan, dan cakupan program. Hal ini akan memudahkan pemantauan efektivitas kerja sama antar sektor dan memastikan komitmen bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. **Indikator Peran Teknis**: Peran ini mengukur seberapa efektif pendataan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap ibu dan anak balita stunting. Proses pendataan ini belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain masyarakat yang enggan datang ke posyandu, sehingga menyulitkan dinas kesehatan dalam melakukan pendataan secara menyeluruh. Untuk meningkatkan akurasi pendataan, pemerintah dapat menerapkan pendekatan rumah ke rumah dengan melibatkan kader kesehatan dan relawan untuk mendata ibu dan anak balita stunting, terutama yang tidak hadir di Posyandu. Selain itu, pemberian insentif seperti sembako atau kebutuhan anak bagi ibu yang rutin mengikuti Posyandu dapat meningkatkan partisipasi. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi atau SMS pengingat jadwal Posyandu, juga dapat mempermudah proses pendataan dan komunikasi dengan masyarakat.

SIMPULAN

Peran fasilitatif dalam penanganan stunting di Kabupaten Padang Lawas masih belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. Hal ini menyulitkan ibu, anak balita, dan masyarakat untuk memperoleh bantuan seperti biskuit, susu, atau bantuan lainnya yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Selain itu, peran edukasi juga belum berjalan dengan efektif, terutama karena banyak ibu yang kurang memahami cara mengakses media massa, seperti televisi dan smartphone, serta terbatasnya keterampilan mereka dalam menggunakan perangkat tersebut. Akibatnya, informasi mengenai penanganan stunting menjadi terbatas. Di sisi lain, peran reseptasional pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga belum optimal karena kurangnya kerjasama dengan pihak luar. Hanya sejumlah pihak yang terlibat dalam upaya penanganan stunting, padahal kerjasama yang lebih luas dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung penanganan ibu serta anak balita stunting. Sementara itu, peran teknis menunjukkan upaya maksimal dari pemerintah dalam melakukan pendataan stunting, meskipun pendataan tersebut masih belum merata. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tetap berupaya menjalankan pendataan secara menyeluruh. Sebagai langkah perbaikan, disarankan untuk memperkuat kebijakan berbasis masyarakat dengan pendekatan yang lebih intensif. Salah satunya dengan memperkuat peran kader kesehatan dalam melakukan penyuluhan dan mendampingi masyarakat secara langsung, serta memperluas akses informasi melalui media yang dapat dijangkau oleh ibu-ibu. Pemerintah juga perlu menjalin kerjasama dengan lebih banyak pihak, termasuk organisasi masyarakat dan sektor swasta, untuk mendukung penanganan stunting. Di samping itu, penting untuk melakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, agar dapat memperkaya kesimpulan serta meningkatkan perencanaan dan implementasi kebijakan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

"Indeks Pembangunan Manusia (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020) 2021-2023". www.sumut.bps.go.id. Diakses tanggal 29 Desember 2023.

"Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN

T.A 2019" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. 2019. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2020-01-11. Diakses tanggal 20 Januari

Aryastami, N. K. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi. BPS Stastik (2016) Pengertian Kemiskinan dan Kombinasi). Bandung : Alfabeta :

203 – 339.

Fikawati, S. (2017). Kemenkes RI. (2018b). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian.

Germas. (2018). Lampung: Ayo Cegah *Stunting*!. Gerakan Masyarakat Hidup Kementerian Kesehatan RI. (2018). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) RI *Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial* Lainnya. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Pawalin, O. (2017). Peran Dinas Sosial Kota Metro dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29648

Perry, S. (2017). *Social Role Theory and Family Interaction*. Sage Publications

Rosyadi, I. (2017). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Pedesaan dalam Persefektif Struktural. Universitas Muhammadiyah Surakarta. ISSN 2407-9189

Soehartono, I. 1995. Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Soerjono Soekanto (2002:243), Pengertian Peran.

Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, "Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka 2023" (pdf). www.padanglawaskab.bps.go.id. hlm. 12, 58, 141. Diakses tanggal 18 Maret 2023.

Andi Tenri Mantikaisih Laras (2023) *Manajemen angka Kemiskinan Ekstrem Terhadap penurunan Angka Stunting dikabupaten dompu nusa tenggara barat* Universitas Sangga Buana

Muhammad Heru Akhmadi Pasaribu, Iyas Theresia Pasaribu, *Peran Belanja Negara Dalam Penurunan Prevelensi Stunting* Politeknik Keuangan Negara STAN.

Moleong, Lexy J,. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. BANDUNG : PT REMAJA ROSDAKARYA

Nurliana Panggabean (2001) *Studi Kejadian Stunting Pada Balita di Puskesmas Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas* Program Studi Kebidanan, Universitas Aufa Royhan Dikota Padang Sidimpuan.

Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan *Stunting* dan Pencegahannya. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 225-229.

Rini Archada Saputri, J. T. (2019). Hulu-Hilir Penanggulangan *Stunting* di Indonesia. Jurnal Of Political Issues, 3-10.

Sri hajijah Purba (2019) *Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Didesa Secanggang Kabupaten Langkat* Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

Yudha Aditya, A. i. (2019). Peran Dinas Pendidikan Dalam Program dalam Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Sekolah Dasar Negeri 006 Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan, 508-518.

Zulkifli,Cutmega Putri (2023) *Peran Bappeda dalam Menangani Penurunan Ekstem dikabupaten Simalue* Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar.

Dinkes Provinsi Sumatera Utara, (2019). Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Kemenkes RI. (2018b). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian. http://dinkes.sumutprov.go.id.

Mengenal Apa itu *Stunting* (2022). Diakses pada 11 April 2023. UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pemerintahaan Daerah.

UU Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Padang lawas.